

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Kurikulum menjadi komponen acuan oleh setiap satuan pendidikan. Kurikulum berkembang sejalan dengan perkembangan teori dan praktek pendidikan, selain itu juga bervariasi sesuai dengan aliran atau teori pendidikan yang dianut pemangku kebijakan. Kurikulum memiliki kedudukan yang sangat sentral dalam keseluruhan proses pendidikan. Kurikulum juga mengarahkan segala bentuk aktivitas pendidikan kepada tercapainya tujuan-tujuan pendidikan. Sehingga kurikulum menjadi elemen pokok dalam sebuah layanan program pendidikan. Kurikulum juga memiliki peranan penting dalam pendidikan, kaitannya yaitu dengan penentuan arah, isi, dan proses pendidikan yang pada akhirnya menentukan macam dan kualifikasi lulusan suatu lembaga pendidikan. Dengan kata lain kurikulum menjadi syarat mutlak dari pendidikan dan kurikulum merupakan bagian yang tak terpisahkan dari pendidikan dan pengajaran. Sehingga sangatlah sulit dibayangkan bagaimana bentuk pelaksanaan suatu pendidikan tanpa adanya kurikulum.

Pada dasarnya kurikulum tidak hanya berisikan tentang petunjuk teknis materi pembelajaran. Kurikulum merupakan sebuah program terencana dan menyeluruh, yang secara tidak langsung menggambarkan manajemen pendidikan suatu bangsa. Dengan begitu otomatis kurikulum memegang

peran yang sangat penting dan strategis dalam kemajuan dunia pendidikan suatu negara.

Efektifitas implementasi dan pengembangan kurikulum di lapangan sangatlah bergantung pada kompetensi guru dan sarana yang tersedia di sekolah untuk memfasilitasi guru dalam mengartikulasi topik-topik yang termuat dalam kurikulum. Guru yang menjalankan segala sesuatu yang terjadi dalam kelasnya maupun dalam ekstra-organisasi sekolah. Sehingga keberhasilan pengembangan kurikulum juga bergantung pada manajemen dari setiap guru. Kurikulum sendiri pada setiap satuan pendidikan sebagai alat penggerak pendidikan. Dengan kesesuaian dan ketepatan setiap komponen yang ada dalam kurikulum diharapkan sasaran dan tujuan pendidikan akan tercapai secara maksimal (Bambang Indriyanto, 2012: 446).

Dikarenakan peran kurikulum sendiri sangatlah penting dalam upaya pencapaian tujuan pendidikan nasional, maka pemerintah Indonesia telah melakukan berbagai macam upaya untuk merevisi, mengembangkan dan menyempurnakan desain kurikulum pendidikan nasional Indonesia untuk bisa menghasilkan proses dan produk pendidikan yang bermutu dan kompetitif. Sampai saat ini, tercatat sembilan kurikulum pernah dikembangkan dan dilaksanakan dalam sistem pendidikan nasional.

Kurikulum tidak bersifat statis, sehingga munculnya kurikulum disesuaikan dengan perkembangan zaman dan tuntutan kemajuan kehidupan dalam masyarakat. Kurikulum memang selalu berkembang dan menyelaraskan diri dengan kemajuan zaman. Untuk itu pengembangan

kurikulum berupa proses yang dinamis dan integratif yang memang perlu diupayakan melalui langkah-langkah yang sistematis, profesional dan melibatkan seluruh aspek yang terkait dalam tercapainya tujuan pendidikan nasional. Namun jika kita melihat di lapangan perubahan kurikulum yang dirasa menjadi suatu siklus yang *ekstrem* malah menunjukkan banyak masalah karena perubahan kurikulum itu sendiri yang terlalu sering. Setiap pergantian rezim kepemimpinan atau perubahan menteri pendidikan sendiri hampir bisa dipastikan akan terjadi perubahan kurikulum yang akhirnya membuat para aktor di bidang pendidikan tersesat di dalam kurikulum yang tidak jelas. Seharusnya perubahan kurikulum tidak boleh dilakukan secara radikal, ibaratnya pejabat berikutnya tinggal melanjutkan apa yang telah ditinggalkan oleh pendahulunya.

Perubahan yang paling mudah dilihat adalah dari nama Pendidikan Kewarganegaraan sendiri yang telah berkali-kali mengalami perubahan seperti Pendidikan Moral Pancasila, P4, Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan, Pendidikan Kewarganegaraan dan berubah lagi hingga kini kembali menjadi Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan. Hal ini tentunya akan memunculkan pertanyaan tentang kompetensi guru itu sendiri sebagai garda terdepan dalam pelaksanaan dan pengembangan kurikulum di sekolah. Apakah dengan sering berubahnya kurikulum nasional akan semakin meningkatkan kualitas mutu pendidikan di Indonesia sendiri, ataukah hanya akan menyebabkan guru-guru menjadi tidak memiliki kompetensi yang diharapkan sesuai dengan kurikulum nasional yang selalu berubah-ubah.

Hingga pada tahun 2006/2007 pemerintah melakukan perubahan kurikulum yaitu Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan (KTSP) untuk jenjang pendidikan dasar dan menengah dengan mengacu pada Standar Isi (SI) dan Standar Kompetensi Lulusan (SKL) serta berpedoman pada panduan yang disusun oleh Badan Standar Nasional Pendidikan (BSNP). KTSP dianggap sebagai penyempurna dari kurikulum yang berlaku sebelumnya yaitu Kurikulum Berbasis Kompetensi (KBK). Hal itu bertujuan agar tercipta keselarasan antara kurikulum dengan kebijakan guru di bidang pendidikan, meningkatkan efektifitas dan efisiensi dalam pengajaran serta meningkatkan mutu lulusan, juga merelevansikan pendidikan dengan tuntutan dan kebutuhan masyarakat.

Konsep KTSP dianggap sangat relevan terhadap desentralisasi pendidikan serta sejalan juga dengan pelaksanaan otonomi daerah dan konsep manajemen berbasis sekolah yang memuat otonomi sekolah di dalamnya. Dengan begitu pemerintah daerah lebih leluasa dalam usaha meningkatkan kualitas pendidikan di daerahnya. Menurut E. Mulyasa (2007: 20) beberapa hal yang perlu dipahami dalam kaitannya dengan KTSP adalah sebagai berikut:

1. KTSP dikembangkan sesuai dengan kondisi satuan pendidikan, potensi dan karakteristik daerah, serta sosial budaya masyarakat setempat dan peserta didik.
2. Sekolah dan komite sekolah mengembangkan KTSP dan silabusnya berdasarkan kerangka dasar kurikulum dan standar kompetensi lulusan, di bawah supervisi dinas pendidikan kabupaten/kota, dan departemen agama yang bertanggung jawab di bidang pendidikan.
3. Kurikulum tingkat satuan pendidikan untuk setiap program studi di perguruan tinggi dikembangkan dan ditetapkan oleh

masing-masing perguruan tinggi dengan mengacu pada Standar Nasional Pendidikan.

Studi Herry Widyastomo (2012: 244) dalam Jurnal Pendidikan dan Kebudayaan tentang kemampuan guru dalam mengembangkan dan menyusun KTSP, mendapati temuan bahwa kemampuan guru di wilayah Jabodetabek dalam menyusun dan mengembangkan KTSP masih sangat rendah. Sebagian besar hanya mengadaptasi bahkan mengadopsi kurikulum dari satuan pendidikan lain (*copy paste*) atau dari penerbit buku yang belum tentu sesuai dengan satuan pendidikan, potensi daerah/karakteristik daerah, sosial budaya masyarakat setempat, dan peserta didiknya. Setelah berlakunya KTSP kurang lebih selama lima tahun keraguan akan kemampuan guru dalam menyusun dan mengembangkan kurikulum sesuai dengan isu-isu di lapangan. Banyak guru yang belum siap menerima pelimpahan kewenangan dari pemerintah pusat untuk menyusun sendiri kurikulum satuan pendidikannya. Pada akhirnya hanya mengadopsi pengembangan KTSP lain yang belum tentu sesuai dengan satuan pendidikannya.

Guna terciptanya kelancaran guru dalam pengimplementasian KTSP, maka perlu melihat sejauh mana guru melakukan perbaikan kualitas dirinya. Pemerintah juga telah mencanangkan program sertifikasi pendidik untuk menunjang kompetensi guru dalam menjalankan dan mengembangkan KTSP. Guru bersertifikat pendidik dituntut mengembangkan KTSP berdasarkan empat kompetensi guru, yaitu kompetensi pedagogik, profesional, kepribadian dan sosial. Sehingga diharapkan akan menghasilkan kompetensi

lulusan yang tidak hanya pandai dalam teori namun juga berhasil dalam penguasaan kemampuan praktik. Namun menurut IG. A. K. Wardani (2012: 32) pada kenyataannya di lapangan berdasarkan data pada pendidik guru dari Lembaga Pendidikan Guru beberapa menunjukkan bahwa tidak semua pendidik guru menunjukkan kesediaan/kesadaran untuk mengembangkan profesionalisme diri. Mengembangkan profesionalisme menjadi suatu keharusan bagi guru dengan didasari oleh empat alasan diantaranya 1) kompetensi profesionalisme, 2) perkembangan pesat ilmu pengetahuan dan teknologi, 3) paradigma pembelajaran seumur hidup, dan 4) permintaan hukum (sebagaimana tertuang dalam Undang-undang Nomor 14 tahun 2005 tentang Guru dan Dosen).

Peneliti juga masih melihat bahwa program sertifikasi tersebut menimbulkan reaksi yang beragam dari para guru Pendidikan Kewarganegaraan khususnya. Dengan adanya tunjangan profesionalitas seharusnya para guru dapat lebih mengembangkan diri untuk mencapai kompetensi-kompetensi yang seharusnya dimiliki guru sebagai faktor keberhasilan dalam mengembangkan kurikulum. Namun dengan adanya tunjangan profesionalitas tersebut, kinerja guru belum ditopang sepenuhnya oleh derajat penguasaan kompetensi yang memadai. Sehingga hal ini berdampak pada minimnya kualitas kompetensi sebagai guru pada guru-guru bersertifikat pendidik di Kabupaten Kulon Progo.

Ada sedikitnya dua hasil penelitian penting tentang guru Pendidikan Kewarganegaraan di Kulon Progo yang telah dilakukan sebelumnya oleh

Ratna Dwi Rahmawati (2009: vii) tentang implementasi Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan mata pelajaran Pendidikan Kewarganegaraan di SMA Negeri Se-Kabupaten Kulon Progo yang menyimpulkan bahwa:

1) sebagian besar pemahaman KTSP oleh guru mata pelajaran PKn di SMA Negeri Se-Kabupaten Kulon Progo masih belum memadai, 2) perencanaan mengenai Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan oleh guru mata pelajaran PKn telah mempersiapkan perangkat pembelajaran mulai dari program tahunan, program semester, program mingguan dan harian, program pengayaan dan remidi, meskipun dalam penyusunan silabus dan RPP sebagian besar guru mata pelajaran PKn belum menyusun sendiri dan masih mengadopsi dari dinas pendidikan, 3) pelaksanaan mengenai Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan oleh guru dalam proses pembelajaran mata pelajaran PKn, sebagian besar masih menggunakan media pembelajaran sederhana, 4) evaluasi/hasil pelaksanaan KTSP mata pelajaran PKn di SMA Negeri Se-Kabupaten Kulon Progo oleh sebagian besar menggunakan penilaian berbasis kelas. Penilaian kelas yang dibakukan telah mampu memberikan kemajuan dan hasil belajar siswa, mendiagnosa kesulitan belajar, memberikan umpan balik (*feed back*) materi yang telah disampaikan, memperbaiki proses pembelajaran yang dilakukan, pembentukan kompetensi siswa serta menentukan kenaikan kelas.

Penelitian lainnya oleh Dina Mariya (2012: vii) yang mengkaji kinerja guru mata pelajaran Pendidikan Kewarganegaraan jenjang SMA yang bersertifikasi di Kabupaten Kulon Progo, dimana dalam penelitiannya Dina Mariya menyimpulkan bahwa:

Pertama, kinerja guru mata pelajaran PKn jenjang SMA yang bersertifikasi di Kabupaten Kulon Progo dilihat dari segi penguasaan kompetensi dengan penjabaran sebagai berikut: a) kompetensi pedagogik berada pada kategori baik; dan b) kompetensi profesional berada pada kategori baik. *Kedua*, kendala-kendala guru dalam peningkatan kinerja terutama tentang pengaturan waktu, tuntutan kerja yang berat, keterbatasan sarana dan prasarana sekolah, birokrasi yang tidak transparan, dan siswa yang kurang termotivasi. *Ketiga*, upaya guru mengatasi kendala tersebut yaitu berusaha mengatur waktu

dengan baik, rutin mengikuti kegiatan MGMP PKn, berbagi pengalaman tentang pembuatan administrasi pembelajaran dan mencari informasi tentang hal-hal terkini dari internet, mengusulkan sekolah bekerja sama dengan pemerintah untuk melengkapi sarana, berpikir positif, dan pemberian motivasi kepada siswa secara kontinyu.

Dari penelitian Ratna Dwi Rahmawati dapat dilihat bahwa sebagian besar guru mata pelajaran Pendidikan Kewarganegaraan pada jenjang sekolah menengah atas belum sepenuhnya memiliki pemahaman mengenai KTSP itu sendiri. Hal ini terlihat dimana guru masih menggunakan media pembelajaran yang sederhana serta masih menggunakan silabus dan Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP) yang dibuat oleh dinas pendidikan. Seharusnya seorang guru profesional yang telah bersertifikat pendidik harus memiliki kompetensi pedagogik, kepribadian, sosial, dan profesional, sehingga guru tersebut harus mampu mengembangkan sendiri media pembelajaran untuk menunjang pembelajaran di kelas dan sebagai refleksi dari pengembangan diri. Guru seharusnya mampu membuat dan mengembangkan silabus juga RPP mata pelajaran yang mereka ampu sebagai wujud dari pengembangan kurikulum.

Dina Mariya mengungkapkan kendala-kendala yang dihadapi oleh seorang guru tersebut seharusnya bisa diatasi jika mereka mampu menjalankan ke-empat kompetensi tersebut dengan rasa tulus, ikhlas, dan bertanggung jawab. Seperti merujuk dari hasil penelitian Dina Mariya bahwa dalam perjalanannya dalam melaksanakan kinerjanya sebagai guru pasti terganjal oleh berbagai kendala-kendala tersebut di atas. Namun sebagai guru yang telah bersertifikat pendidik dengan kompetensi pedagogik dan profesional yang baik, tentu mereka dapat menemukan pemecahan dalam

menanggapi berbagai kendala tersebut. Hanya saja masih jarang guru-guru yang telah bersertifikat pendidik memiliki inisiatif untuk mengembangkan KTSP yang benar-benar menjadi cerminan karakter dan kultur sekolah. Para guru sebagian besar belum memiliki inisiatif dan kreatifitas dalam membuat metode pembelajaran, sumber belajar, dan evaluasi penilaian KTSP yang mencakup kognitif, afektif, dan psikomotorik. Sebagian besar dari mereka masih merujuk dan mengadopsi pengembangan kurikulum yang diberikan dinas pendidikan.

Dari dua hasil penelitian oleh Ratna Dwi Rahmawati dan Dina Mariya disebutkan bahwa dalam implementasi KTSP guru SMA di Kabupaten Kulon Progo masih sangat kurang namun dalam kinerjanya dilihat dari penguasaan kompetensinya sudah cukup berkembang. Pada April 2013 akan segera disahkan kurikulum baru untuk mengganti KTSP. Hal ini tentu menuntut kesiapan dari para guru Pendidikan Kewarganegaraan untuk menjalankan kurikulum baru tersebut secara profesional. Perubahan kurikulum baru itu meliputi perubahan nomenklatur dan substansi materi yang termuat di dalamnya. Pendidikan Kewarganegaraan akan kembali menjadi Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan. Kurikulum tersebut juga memuat tentang pendidikan karakter sebagai dasar pengembangannya. Namun ketidaksiapan guru dalam menghadapi perubahan tersebut disinyalir akan memunculkan anggapan guru bahwa kebijakan kurikulum baru tersebut akan menghambat pengembangan kompetensi diri karena kurikulum tersebut bersifat sentralistik. Seperti yang diungkapkan Bambang Indriyanto (2012: 449)

dalam pengembangan Kurikulum 2013 kompetensi guru menjadi tantangan yang paling menonjol. Guru diasumsikan tidak akan siap melaksanakan Kurikulum 2013 karena pemerintah dianggap tergesa-gesa dalam penerapan Kurikulum 2013. Pandangan yang pesimistis juga mengatakan bahwa ketidaksiapan tersebut selain kebijakannya yang tergesa-gesa juga terjadi karena kurikulum yang sebelumnya (KTSP) saja belum sepenuhnya dipahami.

Dari hasil yang telah dipaparkan, peneliti memiliki ketertarikan untuk melakukan penelitian lanjutan mengenai pendapat dan sikap guru Pendidikan Kewarganegaraan di SMA Negeri Se-Kabupaten Kulon Progo terhadap implementasi kebijakan kurikulum Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan Tahun 2013.

B. Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, dapat diidentifikasi beberapa permasalahan yang relevan sebagai berikut :

1. Guru Pendidikan Kewarganegaraan SMA Negeri belum memenuhi kualifikasi sebagai guru profesional karena kinerjanya belum ditopang sepenuhnya oleh derajat penguasaan kompetensi yang memadai.
2. Munculnya kebijakan baru mengenai kurikulum tahun 2013, sebelum guru Pendidikan Kewarganegaraan memahami sepenuhnya mengenai KTSP dan pengembangannya akan memunculkan kebingungan pada guru terhadap kurikulum Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan.
3. Guru SMA Negeri tidak menyadari akan tuntutan profesionalitasnya dalam mengembangkan kurikulum demi tercapainya tujuan

pendidikan nasional akan mengakibatkan kurikulum tidak berjalan seperti yang diharapkan.

4. Kebijakan perubahan kurikulum yang terlalu sering dilakukan untuk memenuhi tuntutan perkembangan zaman memunculkan anggapan bahwa perubahan kurikulum tersebut menjadi tidak penting, sehingga guru Pendidikan Kewarganegaraan akan menjalankan kinerjanya dengan tidak maksimal dan tidak sesuai dengan kompetensi yang harus dimiliki.
5. Kebijakan perubahan kurikulum tahun 2013 yang sentralistik akan menghambat pengembangan kompetensi dalam diri guru Pendidikan Kewarganegaraan sebagai tuntutan sertifikasi guru dalam jabatan.

C. Batasan Masalah

Dari beberapa masalah yang timbul sehubungan dengan kebijakan kurikulum tahun 2013, serta keterbatasan yang ada pada peneliti, baik pikiran, tenaga, waktu, dan biaya maka penelitian ini lebih difokuskan untuk mengetahui pendapat dan sikap guru Pendidikan Kewarganegaraan di SMA Negeri Se-Kabupaten Kulon Progo terhadap implementasi kebijakan kurikulum Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan Tahun 2013.

D. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang masalah, identifikasi masalah, dan pembatasan masalah, maka penelitian ini menitikberatkan pada pendapat dan sikap guru Pendidikan Kewarganegaraan di SMA Negeri Se-Kabupaten

Kulon Progo terhadap implementasi kebijakan kurikulum Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan Tahun 2013.

Adapun rumusan masalahnya adalah sebagai berikut :

1. Bagaimana pendapat guru Pendidikan Kewarganegaraan di SMA Negeri Se-Kabupaten Kulon Progo menanggapi perubahan kurikulum mata pelajaran Pendidikan Kewarganegaraan menjadi Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan tahun 2013?
2. Bagaimana sikap guru Pendidikan Kewarganegaraan di SMA Negeri Se-Kabupaten Kulon Progo dalam mengimplementasikan perubahan kurikulum mata pelajaran Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan dalam Kurikulum 2013?

E. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka tujuan penelitian ini adalah untuk mendeskripsikan:

1. Pendapat guru Pendidikan Kewarganegaraan di SMA Negeri Se-Kabupaten Kulon Progo menanggapi perubahan kurikulum mata pelajaran Pendidikan Kewarganegaraan menjadi Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan tahun 2013.
2. Sikap guru Pendidikan Kewarganegaraan di SMA Negeri Se-Kabupaten Kulon Progo dalam mengimplementasikan perubahan kurikulum mata pelajaran Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan dalam Kurikulum 2013.

F. Manfaat Penelitian

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi yang bermanfaat, baik secara teoretis maupun praktis.

1. Manfaat Teoretis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi positif bagi dunia pendidikan khususnya evaluasi terhadap persiapan dan pelaksanaan Kurikulum 2013 mata pelajaran Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan serta kegiatan pembelajaran di sekolah. Selain itu penelitian ini diharapkan juga dapat dijadikan bahan rujukan bagi penelitian-penelitian selanjutnya.

2. Manfaat Praktis

a. Bagi Peneliti

Penelitian ini diharapkan dapat menambah dan meningkatkan wawasan pengetahuan dan sebagai latihan dalam menerapkan teori-teori yang telah diperoleh di bangku perkuliahan.

b. Bagi Mahasiswa

Sebagai salah satu sarana penerapan serta pengembangan teori yang telah didapat selama proses perkuliahan.

c. Bagi Guru

Sebagai bahan masukan untuk lebih meningkatkan kinerja guru khususnya guru bersertifikat pendidik terutama dalam segi penguasaan kompetensi pedagogik dan kompetensi profesional bagi guru yang telah bersertifikat pendidik.

G. Batasan Pengertian

1. Guru

Guru memiliki pengertian yang bermacam-macam. Selain itu guru juga mempunyai tugas yang bermacam-macam tergantung dari sudut pandang penilai. Menurut Pasal 1 UU No. 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen, guru didefinisikan sebagai:

...pendidik profesional dengan tugas utama mendidik, mengajar, membimbing, mengarahkan, melatih, menilai dan mengevaluasi peserta didik pada pendidikan anak usia dini jalur pendidikan formal, pendidikan dasar dan pendidikan menengah.

2. Pendidikan Kewarganegaraan

Merujuk pada Lampiran Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 22 Tahun 2006, maka Pendidikan Kewarganegaraan adalah:

... mata pelajaran yang memfokuskan pada pembentukan warga negara yang memahami dan melaksanakan hak-hak dan kewajibannya untuk menjadi warga Negara Indonesia yang cerdas, terampil dan berkarakter yang diamanatkan oleh Pancasila dan UUD 1945.

3. Kurikulum

Lunenberg dan Ornstein (2000: 433) sebagaimana dikutip dalam buku Manajemen Pendidikan oleh Tatang M. Amirin mengemukakan bahwa kurikulum dapat didefinisikan dalam berbagai pengertian:

...sebagai rencana, dalam kaitan dengan pengalaman, sebagai suatu bidang studi, dan dalam kaitannya dengan mata pelajaran dan tingkatan kelas. Suatu kurikulum dapat dapat digambarkan sebagai suatu rencana tindakan, atau suatu dokumen tertulis, yang meliputi strategi untuk menuju keberhasilan tujuan yang diinginkan. Kurikulum juga dapat digambarkan secara luas, yang berhubungan

dengan pengalaman pelajar. Pandangan ini mempertimbangkan hampir semua pengalaman di sekolah, bahkan di luar sekolah (sepanjang itu direncanakan) sebagai bagian dari kurikulum (Tatang M. Amirin dkk., 2011: 36).

Berdasarkan penjelasan-penjelasan istilah di atas, dapat dirumuskan bahwa yang dimaksud dengan “Pendapat dan Sikap Guru Pendidikan Kewarganegaraan Di SMA Negeri Se-Kabupaten Kulon Progo Terhadap Implementasi Kebijakan Kurikulum Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan Tahun 2013” dalam penelitian ini adalah pendapat dan sikap guru mata pelajaran Pendidikan Kewarganegaraan se-Kabupaten Kulon Progo menanggapi perubahan mata pelajaran Pendidikan Kewarganegaraan menjadi Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan pada Kurikulum 2013 serta implementasinya di lapangan.